

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKA PUTRA
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 759686

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 12.288.600.000**

1. Tanah Seluas 835 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 9396 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU SANGKAR,
HASIL SENDIRI Rp. 3.288.600.000
3. Tanah Seluas 229 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL
SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/200 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA
BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/350 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 650.000.000**

1. MOBIL, JEEP WRANGLER 3.8 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
650.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 80.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. ----****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 13.018.600.000****III. HUTANG****Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 13.018.600.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.